



**News Title : Langkah Maju Bursa CPO**

**Media Name : bisnis.com**

**Journalist : Hendra Wibawa, Indra Gunawan**

**Publish Date : 03 March 2023**

**Tonality : Positive**

**News Page :**

**News Value : 3,000,000**

**Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Eddy Martono (Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki))**

**Ads Value : 1,000,000**

**Section/Rubrication : Utama**

**Topic : Bursa Kripto**

MENYAWIT  
Langkah Maju Bursa CPO

DINA GUNAWA & HENDRA WIBAWA  
KUALA LUMPUR, 03/03/2023 00:00 WIB

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Volume ekspor (juta MT)	20,44	27,64	43,55	42,53	39,23	32,78	34,67
Milai ekspor (USD miliar)	119	22,98	22,31	21,86	22,97	30,32	30,80
Pungutan ekspor (Rp miliar)	11,687	14,271	14,464	0	21,277	71,643	34,594

  

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Volume pemakaian (juta KL)	2,77	2,37	3,55	6,37	8,4	9,29	10,6
Dana biodiesel yang dibayar (Rp triliun)	10,68	10,31	5,65	3,07	28,00	51,86	34,56

**A+** Bisnis, JAKARTA — Kabinet pemerintah membuat harga acuan minyak sawit mentah pada tahun ini mulai mengacu pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai acuan baru ekspor komoditas itu.

**A-** Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bahwa bentuk baru itu akan mengubah proses ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka komoditas.

Menurutnya, aturan itu akan membuka beberapa dasar jika direalisasikan di antaranya pemerintah bisa melihat secara langsung tren di pasar kita karena CPO karena semua transaksi akan wajib dicatat di bursa berjangka.

"Strategi besar kami adalah bagaimana menciptakan ekspor CPO melalui bursa berjangka, karena ini nanti ke depannya akan setiap pemerintah dan ekspor CPO dan berjangka harus dipertahankan karena CPO itu dipertahankan di bursa berjangka, utamanya dalam upaya bertema Strategi Indonesia Mengjadi Barometer Harga Sawit Dunia, Kamis (2/3).

Selain itu, dia menambahkan manfaat lainnya kebijakan itu adalah memudahkan proses ekspor CPO dan lebih jelas karena informasinya detail.

Dia menegaskan pemerintah negara juga akan lebih jelas dan transparan termasuk kemudahan pencairan harga CPO sampai dengan tatanan jual-sugar (TBS). Namun, diaid berujar pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang di antaranya melihat bagaimana dampaknya terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan ekspor.

Selain itu, tegasnya, jenis CPO apa saja yang wajib ekspor melalui bursa berjangka dan selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan.

"Tidak salah penting untuk menentukan berapa yang boleh di ekspor, kita juga membutuhkan mekanisme komoditas CPO" kata Didid.

Menurutnya, pertimbangan utama itu diperlukan agar kebijakan itu tidak bertentangan, yaitu saat pengusaha melakukan ekspor lebih mematuhi kewajiban pemerintah kebutuhan domestik.

"Kita sudah ada kebijakan CPO. Lantas apakah CPO ini akan diterapkan atau kebijakan yang selanjutnya ini sudah bisa memenuhkan kebutuhan kebijakan atau seperti apa ini masih terus kami kaji," katanya.

Sejauh ini, dia belum bisa memastikan kapan kebijakan baru itu akan diberlakukan. Alasannya, sampai ini Bappebti masih butuh berdiskusi dengan berbagai pihak untuk membuat kebijakan yang paling tepat.

"Mungkin belum ideal tetapi kira-kira yang paling tepat saat ini, ke depan akan kita pertahankan. Karena kita juga perlu melihat dari sisi insentif pelaku usahanya, baik dari pemerintah, swasta, transaksinya," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mendorong Bappebti untuk membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia salah satunya komoditas CPO.

Menyebutkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun, bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

**Daya Bang**

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan menyoal rencana pemerintah merampingkan kebijakan baru terkait aturan ekspor CPO.

Menurutnya, pengusaha pada prinsipnya akan mengikut, selama tidak mengganggu daya saing produk sawit Indonesia.

"Harus kita lihat utamanya seperti apa yang penting dengan sampai ada beban. Daya baru yang menyebabkan harga kita kurang kompetitif" ujar Eddy kepada Bisnis.

Dia menyambut positif rencana pemerintah yang akan membuat harga acuan atau bursa berjangka komoditas termasuk sawit yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Saat ini, Eddy mengungkapkan Indonesia memiliki ICDD dan KRN Duma sebagai bursa berjangka untuk komoditas sawit.

"Sekarang sebenarnya harga acuan KRN juga sudah digunakan. Artinya, kalau harga pemerintah mau membuat harga acuan melalui bursa komoditas. Seder ada masalah," kata Eddy.

Dalam kesempatan sama, Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Indonesia segera menjadi barometer harga sawit dunia.

Harapan itu dapat diwujudkan dengan pemberlakuan program mandatori pemilikan bahan bakar minyak biodiesel 35% (B35) yang dimulai sejak awal Februari 2023.

Dengan konsistensi penerapan B35, katanya, stabilitas harga sawit akan terga. Sedangkan 13,15 juta hektar CPO bakal terasap program B35 per tahun.

"Strategi Indonesia menjadi barometer sawit dunia, ini bukan cita-cita, tapi kenyataan akan segera terwujud" ujar Noordiatmoko.

Dia mengungkapkan perdagangan dalam membangun industri dan perdagangan sawit Indonesia kerap mendapat tantangan luar biasa, terutama terkait kemampuan negeri sawit di dalam negeri.

Hal tersebut, malah terjadi beberapa tahun lalu. Padahal, menurut Noordiatmoko, ekspor sawit justru membuat masyarakat Indonesia semakin sejahtera.